

# MEWUJUDKAN OTONOMI MASYARAKAT DESA SUATU ALTERNATIF PEMBERDAYAAN DESA

Sri Dayati

*FISIPOL Universitas Tidar Magelang*

## ABSTRACT

*UU No. 32 2004 facilitate decentralization and democracy process, therefore the spirit of rural autonomy and democracy arouse again to reform government data in order to achieve government order that takes side to the society or it can be called as good governance. In this case it needs to set good governance that enables all of the society elements involve in the political matters, to run the government and to formulate the rural interest. Democracy process runs the government that can be formed through the expansion of the public forum, to activate social groups, society forums and the nets among the groups that are not for self help group, but it can be place of awareness of the society and taking part in the goernment problems in the community. In making decision and formulating the society interests, it is not determined by limited elites, but it is done by the rural communities who participate in this area. The rural government in good governance must be trnasparant, accountable and participate in this area.*

*Keywords : Local government, participate, good governance*

## A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi lokal pada umumnya dan otonomi masyarakat desa khususnya adalah sebagai upaya mewujudkan masyarakat mandiri yang mampu membangun masa depannya sendiri. Untuk merealisasikan membutuhkan pemahaman teoritis dan juga pengalaman empiris yang diperoleh dari praktek lapangan mendampingi masyarakat dalam implementasi otonomi masyarakat desa.

• Kita harus meninggalkan paradigma lama tentang desa yang mendirikan masyarakat desa sebagai obyek pembangunan yang tidak punya peran dan suara. Dalam paradigma baru, pemerintah pusat dan daerah akan memastikan

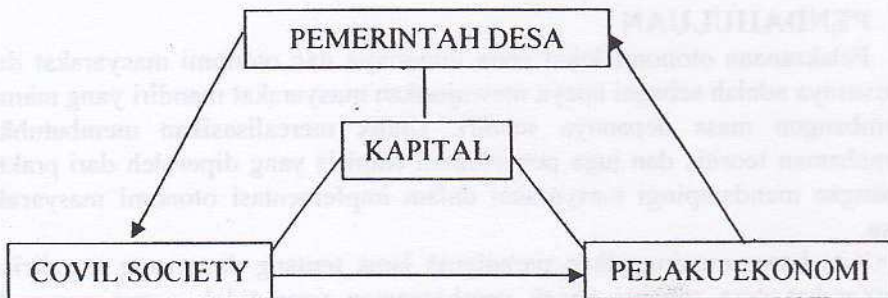
bahwa standar minimal dari pelayanan publik dan demokrasi dikelola secara benar, tetapi menyerahkan kepemimpinan pedesaan yang nyata kepada penduduknya. Tetapi hal ini juga tidak cukup ; maka Pemerintah desa (Kepala Desa dan perangkatnya) juga harus disempower karena selama ini merekalah yang berkuasa di desa. Oleh karena itu masyarakat kecil desa seperti petani, buruh tani, kaki lima, tukang bangunan, perempuan usaha kecil dan lain-lain harus didukung dan diberdayakan.

Otonomi masyarakat desa dipengaruhi oleh tinggi rendahnya intervensi birokrat dan keberdayaan governance desa. Keberdayaan masyarakat desa merupakan suatu kondisi yang harus ada agar otonomi masyarakat desa tersebut terwujud. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberdayaan tersebut adalah seberapa besar kandungan kapital yang dimiliki suatu komunitas atau masyarakat tersebut.

Proses menuju terwujudnya otonomi masyarakat desa bisa berjalan bila aspek pendewasaan sikap dan kemandirian masyarakat semakin tumbuh, sebab pada hakekatnya masyarakat merupakan kekuatan utama untuk mendayagunakan patennya daerahnya. Mereka juga merupakan potensi yang dapat mengontrol kebijakan Pemda agar senantiasa Proporsional dan adil.

Otonomi akan tercapai bila partisipasi masyarakat dikembangkan. Wujud partisipasi masyarakat haruslah dalam seluruh tahapan proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembangunan desa, pemanfaatan hasil serta dalam pengevaluasian.

Keterlibatan masyarakat harus diwujudkan semaksimal mungkin sehingga potensi-potensi yang mendukung dalam sebuah desa dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan norma-norma yang dianut masyarakat desa.



Gambar : Pengaruh kandungan dan distribusi kapital bagi Pemberdayaan Governance desa



Keterangan : → Interaksi  
— Distribusi

## **B. METODE**

Metode yang dipakai adalah library research (riset kepustakaan) dan mempelajari, mengkritisi tulisan-tulisan sejenis yang pernah terbit di media massa ataupun makalah-makalah yang disajikan dalam seminar-seminar ilmiah.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Governance Desa**

Model, bentuk dan konsep otonomi masyarakat desa atau apapun sebutannya senantiasa berkembang dan bukan merupakan suatu yang baku. Hal ini juga harus disesuaikan dengan pemakaiannya. Penerapan otonomi masyarakat desa dalam program aksi merupakan kesempatan yang sangat berharga ; mengingat potensinya yang besar untuk mengembangkan desa secara mandiri di masa yang akan datang.

Di kalangan internasional muncul pemikiran tentang good – governance diterjemahkan sebagai : penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelaksanaannya ditekankan terutama di tingkat nasional dan daerah.

Sedangkan Sudarsono menjelaskan pengertian governance diartikan sebagai metode Check and balance kewenangan dan pengambilan keputusan (oleh Direktur, Manajer, Pemegang Saham, Karyawan dan Stakeholders dalam suatu organisasi). Operator negara diserahkan pada manajer disebut Presiden, pemilik saham dari negara adalah rakyat dan bertindak sebagai konsumen. Board of directors suatu negara diekspresikan ke dalam MPR dan DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat.

Erna Witoelar mengidentifikasi para pelaku governance yaitu sektor publik, sektor swasta dan masyarakat warga (Civil society). Masing-masing pelaku ini memiliki fungsi dimana satu sama lain terjadi keterkaitan. Penerapan governance agar menjadi good governance dilandasi dengan prinsip-prinsip, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, sikap tanggap, kesetaraan, visi yang strategis, efektivitas dan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas dan pengawasan.

Penerapan prinsip good governance yang tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 seyogyanya mencakup

keseluruhan tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat nasional hingga ke desa / kelurahan.

Konsep governance bila diterjemahkan dalam konteks desa menjadi governance desa (Village Governance) interaksi yang seimbang dapat diwujudkan melalui kerja sama dan koordinasi, mengutamakan dialog, negosiasi menuju musyawarah mufakat.

Pemerintah desa terdiri atas Kepala desa dan aparatnya. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk setempat dari calon-calon yang memenuhi persyaratan. Kemudian kepala desa terpilih melengkapi aparatnya mulai dari aparat yang sehari-hari terlibat langsung dalam urusan desa (melakukan aktivitas di kantor desa) maupun yang berperan sebagai kepala wilayah baik dalam lingkup Kepala Dusun (Kadus), Rukun Warga (RW), ataupun Rukun Tetangga (RT). Pemerintah Desa seringkali masih dibantu oleh panitia-panitia yang dibentuk untuk kegiatan khusus seperti panitia pembangunan jalan, masjid dan lain-lain.



Gambar : Interaksi diantara Komponen Governance Desa

Pasar atau pelaku ekonomi di desa dapat dibedakan atas individu dan kelompok. Pelaku ekonomi individu dibagi atas ekonomi informal dan pelaku ekonomi formal. Pelaku ekonomi informal perorangan tidak memiliki badan hukum. Pelaku ekonomi individu yang formal memiliki badan hukum misalnya : CV, PT, Firman.

Pelaku ekonomi kelompok dapat dibedakan atas kelompok swadaya masyarakat (KSM), arisan, kelompok tani dan lain-lain. Pelaku ekonomi kelompok formal berbadan hukum misalnya koperasi misalnya : KUD dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).



Civil Society merupakan salah satu komponen masyarakat desa yang berpotensi untuk melakukan perubahan. Hanya saja tingkat keragaman baik dalam tujuan, kemandirian aktor maupun kegiatannya sangat tinggi.

Jadi model atau bentuk ekonomi masyarakat desa perlu dikelompokkan seperti :

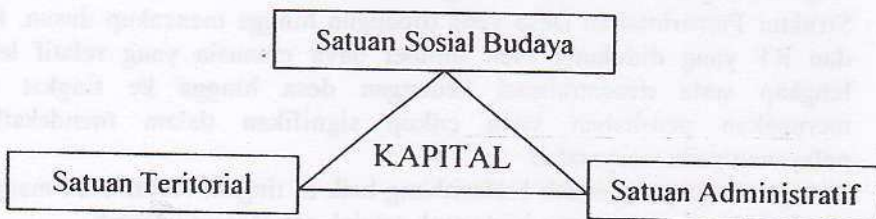
1. Pemerintahan desa dan BPD adalah Pemerintahan Desa.
2. Usaha masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa dikelompokkan sebagai Pelaku Ekonomi Sementara.
3. LPMD merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan di desa yang dapat dikelompokkan sebagai civil society.

Menurut Robert M.Z. Lambang (2003), desa memiliki tiga komponen dasar yang harus ada yaitu :

1. Satuan administratif
2. Satuan teritorial
3. Struktur sosial budaya (termasuk di dalamnya nilai dan norma / hukum adat)

Menurut kemandirian desa merujuk pada kemampuan riil desa dalam menyelenggarakan governance secara internal tanpa atau dengan bantuan eksternal untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggota masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kemampuan komponen governance yang ada di desa untuk mengorganisir sendiri semua potensi yang tersedia dalam lingkungannya. Potensi tersebut berkaitan dengan :

1. Kemandirian komponen governance untuk melakukan self governing secara bersama-sama.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi apa saja yang ada di desa (seperti bentuk-bentuk kapital dan memobilisasikannya untuk kepentingan proyek, kata proyek diartikan sebagai masyarakat desa).



Gambar : Kemandirian desa dalam Perspektif Sosiologi

Civil Society merupakan salah satu komponen masyarakat desa yang berpotensi untuk melakukan perubahan. Hanya saja tingkat keragaman baik dalam tujuan, kemandirian aktor maupun kegiatannya sangat tinggi.

Jadi model atau bentuk ekonomi masyarakat desa perlu dikelompokkan seperti :

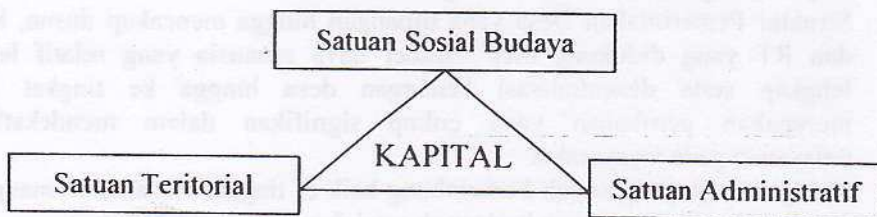
1. Pemerintahan desa dan BPD adalah Pemerintahan Desa.
2. Usaha masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa dikelompokkan sebagai Pelaku Ekonomi Sementara.
3. LPMD merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan di desa yang dapat dikelompokkan sebagai civil society.

Menurut Robert M.Z. Lambang (2003), desa memiliki tiga komponen dasar yang harus ada yaitu :

1. Satuan administratif
2. Satuan teritorial
3. Struktur sosial budaya (termasuk di dalamnya nilai dan norma / hukum adat)

Menurut kemandirian desa merujuk pada kemampuan riil desa dalam menyelenggarakan governance secara internal tanpa atau dengan bantuan eksternal untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggota masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kemampuan komponen governance yang ada di desa untuk mengorganisir sendiri semua potensi yang tersedia dalam lingkungannya. Potensi tersebut berkaitan dengan :

1. Kemandirian komponen governance untuk melakukan self governing secara bersama-sama.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi apa saja yang ada di desa (seperti bentuk-bentuk kapital dan memobilisasikannya untuk kepentingan proyek, kata proyek diartikan sebagai masyarakat desa).



Gambar : Kemandirian desa dalam Perspektif Sosiologi



Kapital atau modal sudah menjadi pengertian yang umum, padahal konsep modal atau kapital dengan dengan sumberdaya baik yang tersedia dalam sistem maupun di luar sistem. Oleh karena itu untuk menyamakan persepsi, maka kapital terdiri dari macam-macam yaitu :

1. Kapital Sosial :

Merupakan jumlah keseluruhan dari sumber adanya aktual ataupun potensial berkaitan dengan jaringan yang dapat bertahan lama memiliki sedikit atau banyak hubungan institusional (Pierre Bourdieu, 1986 dalam Akjandro, 1998).

2. Kapital Fisik :

Didasarkan pada jenis-jenis sumberdaya fisik kurang yang dimiliki elemen governance seperti tanah dan bangunan, kantor dan peralatannya serta sarana dan prasarana lainnya.

3. Kapital Manusia :

Dibentuk melalui perubahan dalam individu yang berkaitan dengan ketrampilan dan kemampuan yang memungkinkan mereka bertindak dengan cara-cara baru. Kapital manusia berkaitan dengan kepemimpinan, tingkat pendidikan, pelatihan maupun pengalaman beorganisasi.

4. Kapital Ekonomi :

Meliputi uang tunai, deposito (tabungan) atau setara dengan uang yang dimiliki organisasi .

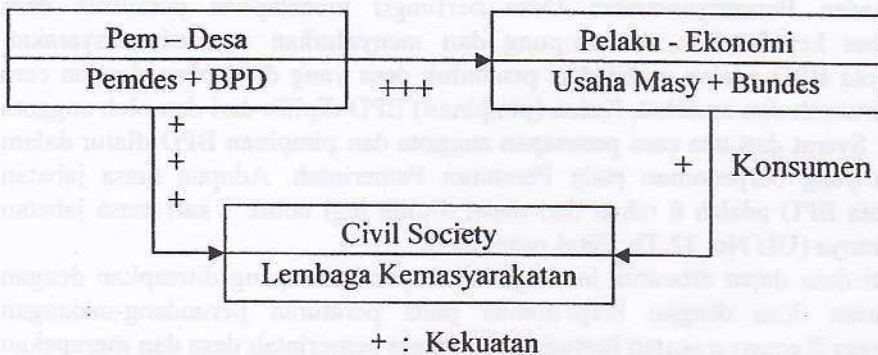
### **Dominasi Pemerintahan Desa**

Peranan Pemerintahan Desa sebagai regulator adalah salah satu faktor penyebab dominannya peranan lembaga ini dalam mengatur desa. Hal ini didukung oleh kandungan kapital yang dimilikinya yaitu ditentukan oleh :

1. Secara normatif peran tersebut diakui oleh undang-undang
2. Kapital yang dimiliki Pemdes sangat kuat
3. Struktur Pemerintahan Desa yang dibangun hingga mencakup dusun, RW dan RT yang didukung oleh sumber daya manusia yang relatif lebih lengkap serta desentralisasi kenangan desa hingga ke tingkat RT merupakan perubahan yang cukup signifikan dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat
4. Jaringan kerja yang sudah berkembang baik di tingkat Kecamatan maupun asosiasi Kepala Desa yang berbentuk setelah era otonomi daerah

5. Pengalaman aparat desa sebelumnya dalam penataan manajemen desa semakin memperkuat posisi pemerintahan desa sebagai Regulator di tingkat desa

Sebagai akibat dominannya kapital pemerintahan desa dibandingkan dengan pelaku ekonomi dan Civil Society maka interaksi diantara ketiganya tidak seimbang. Artinya pemerintahan desa jauh lebih kuat dibandingkan dengan pelaku ekonomi dan Civil Society karena kapital yang dimiliki Pemerintah Desa jauh lebih tinggi. Akibatnya pemerintahan desa jadi dominan, sehingga seringkali mematikan inisiatif elemen governance lainnya. Pemerintahan desa dibiarkan menjadi pemain-pemain tunggal sehingga governance desa lainnya tidak mampu melakukan pengaturan diri.



Gambar : Interaksi tidak seimbang diantara ke 3 elemen governance Desa

### Struktur Pemerintahan Desa

Dalam struktur pemerintahan desa dimulai dari kepala desa membawahi Sekretaris Desa. Adapun Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang disebut kepada urusan ; kemudian Kepala Desa juga membawahi kepada dusun. Dalam praktek organisatoris perangkat pemerintahan desa, juga dibantu oleh RW dan RT yang mengetahui keadaanarganya.

Adapun masyarakat atau individu terkait langsung dalam proses pemerintahan desa, pada hal-hal tertentu saja, seperti masyarakat atau individu pada pemilihan kepala desa berhak menentukan pilihannya sendiri. Dalam praktek organisatoris perangkat pemerintahan desa juga dibantu oleh RW dan RT yang mengetahui keadaanarganya.



Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup (UU No. 32 Th. 2004 pasal 206) :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepala desa.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau pemerintah kabupaten / kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-udnagnan diserahkan kepada desa.

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, Ketua (pimpinan) BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Adapun masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan berikutnya (UU No. 32 Th. 2004 pasal 209).

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Lembaga Kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

#### **D. SIMPULAN**

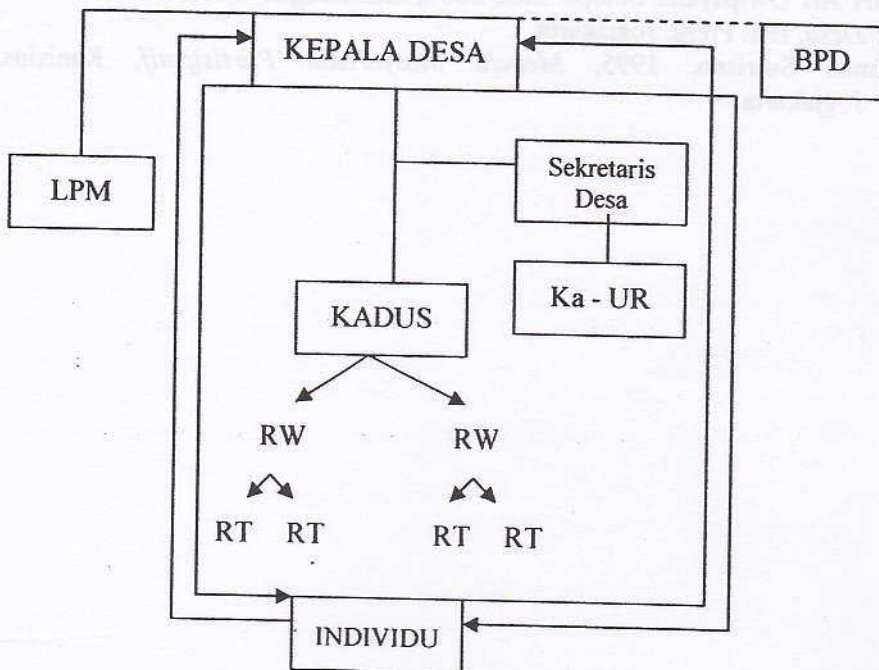
Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah semua hak-hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah yang menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa terdiri atas :

1. Pendapatan asli desa
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota

4. Bantuan dari pemerintah, pemerintahan propinsi dan pemerintahan kabupaten / kota
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Belanja desa yang dimaksud adalah digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa yang dimaksud adalah dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Bupati / Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



Gambar : Bagan Organisasi Pemerintah Desa



## DAFTAR PUSTAKA

- Arkola, 2004, *Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Surabaya.
- Saragi P. Tumpal, 2004, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa ; Alternatif Pemberdayaan Desa*, Yayasan Adikarya Ikapi PORD Fondation.
- Madjid, Nurcholis, *Tuntutan Pengembangan Masyarakat Madani Indonesia abad XX*, Harian Kompas, Jakarta.
- AAGN Ari Dwipayana Sutopo Eko, 2004, *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Jogjakarta.
- Loekman Sutrisno, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Jogjakarta.